

Pemberdayaan Satgas Marinir Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Guna Meningkatkan Pembinaan Potensi Maritim di Wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara

Maikel Fernando

Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut, Indonesia
maikel020611@gmail.com

Submitted: 05th Feb 2024 | **Edited:** 14th May 2024 | **Issued:** 01st June 2024

Cited on: Fernando, M. (2024). Pemberdayaan Satgas Marinir Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Guna Meningkatkan Pembinaan Potensi Maritim di Wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 11(1), 188-196.

Abstract

The purpose of this study: 1) To describe how the empowerment of the marine task force in implementing the security task force for the outer islands. 2) To describe the role of the marine task force in maritime development in the North Natuna Sea Border. 3) To describe how the regulatory authority for the role of the marine task force is to improve maritime potential development in the North Natuna Sea border area. The method used in this research is to use qualitative research methods. The approach used in this study is the qualitative interactive mode of inquiry approach. Researchers performed data processing using NVivo software. The data obtained in this study were analyzed using data analysis techniques Soft System Methodology (SSM). The results of the study: 1) Have good and constructive communication built with stakeholders in the surrounding environment, in order to support the idea of implementing a defense system in their environment so that the community will support defense development efforts? The efforts made by the marine task force to support the security of the outer islands by having the following capabilities include: (a) Limited defense capabilities against foreign military attacks or occupations; (b) Supervising ability; and (c) Ability to prevent transits of illegal activities. 2) Maritime Fostering in the North Natuna Sea Border Area, Assistant Dankormar Col Mar is responsible to the Marine Corps Commander in carrying out his daily tasks. This is because the Dankormar Asops has an operational role of the marine task force in Maritime Development in the North Natuna Sea Border region. 3) The Indonesian Navy agency in the Natuna Region to formulate a Regulation for the implementation of the Marine Task Force in enhancing the development of maritime potential, because the regulations for the Marine Task Force on maritime potential development are not officially legalized yet.

Keywords: Empowerment; Sea Power; Effectiveness; Role; Authority

Abstrak

Tujuan penelitian ini: 1) Untuk mendeskripsikan bagaimana pemberdayaan satgas kelautan dalam melaksanakan satgas keamanan pulau-pulau terluar. 2) Mendeskripsikan peran gugus tugas kelautan dalam pembangunan maritim di Perbatasan Laut Natuna Utara. 3) Mendeskripsikan bagaimana kewenangan pengaturan peran gugus tugas kelautan dalam meningkatkan pengembangan

potensi maritim di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan modus inkuiri interaktif. Peneliti melakukan pengolahan data dengan menggunakan software NVivo. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data Soft System Methodology (SSM). Hasil penelitian: 1) Sudahkah terbangun komunikasi yang baik dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan di lingkungan sekitar, guna mendukung gagasan penerapan sistem pertahanan di lingkungannya sehingga masyarakat akan mendukung upaya pembangunan pertahanan? Upaya yang dilakukan gugus tugas kelautan untuk mendukung keamanan pulau-pulau terluar dengan memiliki kemampuan antara lain: (a) Terbatasnya kemampuan pertahanan terhadap serangan atau pendudukan militer asing; (b) Kemampuan mengawasi; dan (c) Kemampuan untuk mencegah transit kegiatan ilegal. 2) Pembinaan Maritim di Kawasan Perbatasan Laut Natuna Utara, Asisten Dankormar Kolonel Mar bertanggung jawab kepada Komandan Korps Marinir dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Sebab, Asops Dankormar mempunyai peran operasional gugus tugas kelautan dalam Pembangunan Maritim di kawasan Perbatasan Laut Natuna Utara. 3) Badan TNI Angkatan Laut Wilayah Natuna perlu menyusun Peraturan tentang penyelenggaraan Satgas Kelautan dalam peningkatan pengembangan potensi maritim, karena peraturan Satgas Kelautan tentang pengembangan potensi maritim belum disahkan secara resmi. **Kata Kunci:** Pemberdayaan; Sea Power; Efektivitas; Peran; Kewenangan

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi berbagai persoalan dan ancaman, terutama yang datang dari luar. Ancaman tersebut dapat berupa aneksasi wilayah, penguasaan sumber daya alam maupun pencurian ikan. Negara besar seperti Cina merupakan ancaman tersendiri bagi Indonesia karena berpotensi menguasai Laut Cina selatan yang kaya sumber daya alam, seperti minyak bumi dan gas alam. Untuk maksud tersebut Cina telah mencoba memperluas landasan kontinennya sampai ke kepulauan Natuna, kepulauan Riau. Kepulauan Natuna dikenal sebagai daerah yang kaya dengan minyak bumi dan gas alam dan sekarang sedang dieksplorasi oleh Pertamina, memperhatikan manuver yang dilakukan negara raksasa seperti Cina, Indonesia harus lebih serius mengurus wilayah perbatasannya, khususnya wilayah pulau-pulau terluar. Pemerintah Indonesia pada tahun 2018 telah meresmikan penggantian nama wilayah laut ZEE di wilayah Laut Cina Selatan dengan nama Laut Natuna Utara. Tujuannya untuk legitimasi dan melindungi hak wilayah itu dari serobotan China. China sendiri mengklaim wilayah Laut Natuna Utara melalui sembilan garis yang diakuinya sebagai wilayah nelayan China sejak masa Dinasti Ming.

Permasalahan illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing menjadi masalah yang sering dihadapi oleh Indonesia di Perairan Natuna, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyatakan bahwa, walaupun KKP mengklaim telah berhasil menurunkan aktivitas IUU fishing di Laut Natuna, pada kenyataannya sepanjang 2017 terdapat setidaknya 94 pelanggaran pidana perikanan oleh kapal ikan asing. Jumlah itu merupakan angka tertinggi

dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jenis pelanggaran yang umumnya terjadi adalah memasuki laut teritorial Indonesia dan anak buah kapal asing. Dengan adanya OBOR dikhawatirkan kegiatan IUU fishing meningkat, dikarenakan semakin meningkat pula aktivitas pelayaran.

Korps Marinir (Kormar) adalah salah satu Komando Utama Operasi (Kotama Ops) TNI di bawah kendali langsung dari Panglima TNI. Korps Marinir memiliki tugas utama antara lain menyelenggarakan operasi pertahanan pantai, operasi amfibi, operasi pengamanan pulau terluar strategis, dan operasi tempur lainnya baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) berdasarkan dengan kebijakan panglima TNI. Korps Marinir dipimpin langsung oleh komandan korps marinir yang bertanggung jawab kepada panglima TNI.

Satgas Marinir Pengamanan Pulau-pulau terluar adalah Pasukan Marinir yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan menjaga kedaulatan dari segala bentuk ancaman yang ditempatkan di pulau-pulau terluar baik pulau yang berpenduduk maupun tidak berpenduduk yang memiliki nilai Strategis. Penyelenggaraan Pengamanan pulau-pulau terluar dalam hal ini di Pulau Natuna diawali sejak Tahun 2017, dalam proses berlangsungnya penugasan Pengamanan Pulau terluar di Natuna yang dilaksanakan oleh Marinir, Pemberdayaan kemampuan satgas Marinir pengamanan pulau-pulau terluar sangatlah menentukan keberhasilan penugasan. Pemberdayaan satgas marinir pengamanan pulau terluar di Natuna diantaranya meliputi:

1. Pemberdayaan Personel.
2. Pemberdayaan Sarana dan Prasarana.
3. Pemberdayaan Kewenangan Satgas.

Ketiga komponen diatas haruslah bersinergi dan saling berhubungan dalam terlaksananya penugasan pengamanan pulau di Natuna. Dengan harapan setelah diadakannya penelitian dapat memberikan saran dan masukan bagi Pimpinan TNI AL dapat membuat dasar hukum kewenangan satgas marinir dalam pembinaan potensi maritim di wilayah pengamanan pulau-pulau terluar, dalam mendukung tugas pokok TNI AL.

LANDASAN TEORI

Teori Pemberdayaan

Menurut Rappaport, pemberdayaan merupakan konsep yang muncul setelah adanya perencanaan advokasi dan perencanaan komunikatif (Windiarti, 2015). Sehingga pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses atau mekanisme dimana sekelompok orang, organisasi atau masyarakat memiliki penguasaan atas masalah yang dialami. Dalam hal ini dikemukakan bahwa suatu pemberdayaan dapat dikatakan berdaya apabila dapat menemukan hasil yang dicapai yaitu dapat memecahkan suatu permasalahan dan mendapatkan hasil yang dapat bermanfaat bagi kelompok orang tersebut atau suatu organisasi.

Teori Sea Power

Menurut Rear Admiral A.T Mahan teori Sea Power atau Kekuatan Laut, pada dasarnya identik dengan Kekuatan Maritim atau Maritime Power (Riptanto & Hasan, 2023). Apabila kekuatan-kekuatan itu diberdayakan, maka akan meningkatkan Kesejahteraan dan Keamanan Negara. Disamping hal tersebut,

Rear Admiral A.T Mahan menyatakan bahwa “keunggulan Angkatan Laut adalah keperluan utama untuk menjadikan negara besar, kuat dan maju”.

Teori Efektivitas

Menurut David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely tentang Efektifitas dalam (Natika & Nuraida, 2020) menyatakan, Efektivitas adalah melakukan hal yang benar. Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain. kekuatan personel Satgas Marinir sebagai upaya Pengamanan untuk Pulau-Pulau terluar tersebut.

Teori Peran

Teori Peran (Role Theory) adalah sebuah konsep yang mengintegrasikan berbagai teori, orientasi, dan disiplin ilmu, termasuk psikologi, sosiologi, dan antropologi (Rafsanjani, 2021). Konsep ini berawal dari pemikiran dalam sosiologi dan antropologi, tetapi juga diterapkan dan dikembangkan dalam psikologi. Istilah "peran" diadopsi dari dunia teater, di mana seorang aktor harus memainkan karakter tertentu dan, dalam posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan karakter yang diperankan. Hal ini mencerminkan bagaimana individu dalam kehidupan nyata diharapkan untuk bertindak sesuai dengan peran sosial yang mereka emban, seperti peran sebagai orang tua, pekerja, atau teman.

Dalam konteks sosiologi, psikologi, dan antropologi, teori peran menjelaskan bagaimana perilaku individu dibentuk oleh ekspektasi masyarakat terhadap peran tertentu yang mereka jalani (Najoan, et al., 2017). Sebagai contoh, seseorang yang berperan sebagai pemimpin diharapkan untuk menunjukkan sifat kepemimpinan seperti tanggung jawab dan ketegasan. Teori ini membantu memahami dinamika sosial dan bagaimana identitas serta perilaku individu dipengaruhi oleh norma dan harapan sosial yang melekat pada peran mereka. Dengan memahami teori peran, kita dapat lebih baik menganalisis interaksi sosial dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dalam berbagai konteks sosial.

Teori Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Seperti dikutip Ridwan HB (2014), menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah: “Keseluruhan aturan – aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, dikaitkan dengan judul tesis dapat disimpulkan bahwa sebatas mana kewenangan satgas marinir dalam menjalankan tugas pengamanan pulau-pulau terluar guna meningkatkan pembinaan potensi maritim di wilayah Natuna, sejauh mana

kewenangan satgas marinir dalam pembinaan potensi maritim dilihat dari aturan yang ada di dalam TNI AL.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka dalam penelitian ini tidak menggunakan hipotesis yang dirumuskan di awal untuk diuji kebenarannya. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam metode deskriptif kualitatif dengan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dari subjek penelitian melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Melakukan analisis data melalui teknik triangulasi data sebagai teknik analisis untuk mengungkapkan manajemen kinerja guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran.
3. Menyusun kesimpulan hasil penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Perbatasan terutama laut Natuna Utara. Subyek penelitian adalah Komandan Satgas dan Asops Kormar (pejabat Marinir) sebagai sumber utama yang dianggap mendukung dalam penelitian ini menurut pertimbangan peneliti agar dapat memberikan informasi maksimum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Salah satu sifat metode kualitatif adalah dalam proses penelitian dapat berkembang terus sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini sesuai apa yang dikemukakan oleh Moleong.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 3 metode yang diantaranya adalah sebagai berikut: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang saling menunjang atau melengkapi tentang pemberdayaan kemampuan personel Satgas Marinir Pengamanan Pulau-Pulau terluar dalam peningkatan pembinaan Maritim di Wilayah Perbatasan terutama laut Natuna Utara. Adapun instrumen penelitiannya adalah diri peneliti sendiri (human instrument).

Pengolahan data dalam penelitian ini akan menggunakan software Nvivo 11 Plus. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tahap reduksi data, penyajian data dan tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan/ verifikasi.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan teknik analisis data Soft System Methodology (SSM). Penggunaan teknik analisa SSM dalam penelitian ini dianggap relevan karena SSM juga diaplikasikan dalam kajian ilmu pertahanan dan keamanan sejak awal pengembangannya oleh Peter Chekland. Dalam SSM terdapat tujuh tahap analisis data, yaitu pengidentifikasian masalah, mengekspresikan masalah dengan rich picture, memformulasikan root definition dengan melakukan system thinking, pemodelan sistem, membandingkan hasil analisa dengan keadaan di lapangan, analisa inti, dan rekomendasi penyelesaian masalah.

HASIL PENELITIAN

Analisis Intervensi

Pada tahap pertama dalam memahami situasi permasalahan yang dilemparkan dalam penelitian karena tahap ini menetapkan instrumen atau pihak

yang terkait pada situasi (permasalahanan) tersebut. Dalam mengkatagorikan ketiga pihak tersebut, sangat mungkin apabila satu instrument memiliki lebih dari satu peran. Dalam penelitian ini, tiga kategori tersebut adalah:

1. **Clients (C).** Clients (C) penelitian ini adalah Peneliti sendiri serta pembimbing I (Dr. Ir. Harjo Susmoro. S.sos.,S.H. M.H) dan pembimbing II (Dr. Agus Salim, S.H. M. Sc., PSC) yang merupakan kelompok akademisi dan berada di bawah naungan Markas di Wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara.
2. **Practitioners (P).** Praktisi merupakan pihak yang melakukan kajian atau penelitian dengan menggunakan SSM, dalam penelitian ini (P) adalah Peneliti (Ahmad Fauzi).
3. **Owner (O).** Dalam penelitian ini Owner adalah instrumen yang terlibat baik sebagai regulator atau operator serta pengamat, yaitu; Asops Dankormar, Aspotmar Dankormar, Paban Ops, Pabanops Sops Armada I, Pabanren Sops Kormar, Pabantik Sops Kormar.

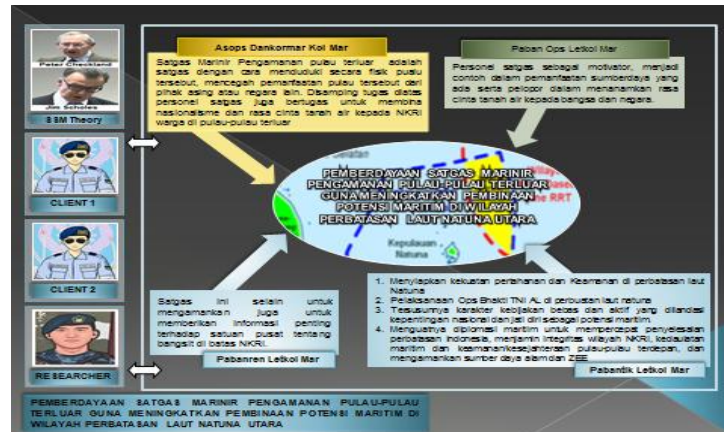
Analisis Sosial

1. Elemen Peran. Kategori yang dibuat berdasarkan peran dalam konteks penelitian ini adalah; regulator, operator dan pengamat. Kelompok regulator dalam penelitian ini adalah Asops Dankormar. Kelompok Operator adalah Pabanren dan Kelompok Pengamat adalah Paban Ops dan Pabantik Sops Kormar.
2. Elemen Norma. Norma yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah segala aturan atau pedoman tertulis maupun tidak tertulis tentang bagaimana Asops Dankormar, Paban Ops Sops Kormar, Pabantik Sops Kormar, Pabanren Sops Kormar dalam pemberdayaan satgas marinir pengamanan pulau-pulau terluar guna meningkatkan pembinaan potensi maritim di Wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara.
3. Elemen Nilai (Values). Elemen nilai (values) pada penelitian adalah aspek kebenaran dari seluruh informan penelitian yang terlibat serta bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Nilai yang dimaksudkan mengacu pada pemberdayaan satgas marinir pengamanan pulau-pulau terluar guna meningkatkan pembinaan potensi maritim di Wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara.

Analisis Politik

1. Disposition of Power. TNI AL, Asops Dankormar Kol Mar adalah pembuat kebijakan strategi dan perencanaan. Pada jajaran kebijakan satgas Marinir Asops Dankormar dan TNI AL sebagai pembuat kebijakan pemberdayaan satgas Marinir guna mendukung pengamanan pulau-pulau terluar meningkatkan pembinaan potensi maritim di Wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara.
2. Nature of Power. Nature of power yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi alami yang terbentuk secara alami dengan struktur power dalam situasi dan proses yang mengontrolnya. Asops Dankormar sebagai aktor perencana penggelaran kekuatan TNI pertahanan sesuai dengan arah kebijakan nasional.
3. Rich picture. Dalam Rich picture berikut ini adalah pendapat masing-masing informan mengenai topik penelitian yang dibahas, yaitu bagaimana pemberdayaan satgas marinir pengamanan pulau-pulau terluar guna

meningkatkan pembinaan potensi maritim di Wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara.



Sumber: Diolah Peneliti, 2020

Gambar 1. Rich pictures dalam Pengiriman Satgas Maritim TNI

Dari hasil pengolahan data dengan tools **NVivo** didapatkan keterkaitan antara pendapat Informan satu dengan yang lainnya. Pertanyaan penelitian menjadi pusat pembahasan dalam pelaksanaan wawancara.

Pemberdayaan Satgas Marinir Dalam Melaksanakan Satgas Pengamanan Pulau-pulau Terluar

Dengan adanya pengamanan di pulau-pulau terluar dan digunakan sebagai wilayah pertahanan dengan menempatkan personel yang sesuai dengan kondisi wilayah sekitar pulau yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai, maka apabila terdapat tindak kejahatan yang terjadi di wilayah perairan sekitar pulau akan dapat dengan cepat diatasi.

Berdasarkan hasil analisa perbandingan model konseptual pada pemberdayaan satgas marinir pengamanan pulau-pulau terluar guna meningkatkan pembinaan potensi maritim di Wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara ditemukan rentang antara real world dan system thinking (gap) dimana aktivitasnya belum dilakukan (gap penelitian) oleh instrumen terkait. Upaya yang dilakukan satgas marinir mendukung pengaman pulau-pulau terluar dengan memiliki kemampuan, antara lain: 1) Kemampuan pertahanan terbatas terhadap serangan atau pendudukan militer Asing; 2) Kemampuan pengawasan; dan 3) Kemampuan pencegahan transit kegiatan illegal.

Kewenangan peran satgas marinir dalam Pembinaan Maritim diwilayah Perbatasan Laut Natuna Utara

Sejalan dengan Asops Dankomar, Paban Ops Letkol Mar juga mengatakan bahwa peran personel dalam mendukung tugas satgas pembinaan maritim diwilayah perbatasan laut natuna utara: "Mendidik dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada NKRI".

Berdasarkan hasil analisa perbandingan model konseptual pada kewenangan peran satgas marinir dalam pembinaan maritim diwilayah perbatasan laut natuna utara ditemukan rentang antara real world dan system thinking (gap) dimana aktivitasnya belum dilakukan (gap penelitian) oleh instrumen terkait. Alasan mengevaluasi pelaksanaan cara mendidik dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada NKRI yang dilakukan oleh Asops Dankormar Kol Mar. Karena dalam Pembinaan Maritim diwilayah Perbatasan

Laut Natuna Utara, Asops Dankormar Kol Mar bertanggungjawab kepada panglima TNI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini dikarenakan Asops Dankormar Kol Mar memiliki peran sebagai satgas marinir dalam Pembinaan Maritim diwilayah Perbatasan Laut Natuna Utara.

Regulasi Tentang Peran Satgas Marinir Dalam Pembinaan Maritim diwilayah Perbatasan Laut Natuna Utara

Pendapat yang dikemukakan oleh Pabantik Letkol Mar dalam pertanyaan Peran TNI AL dalam melaksanakan kebijakan regulasi penyelenggaraan Peran satgas marinir guna meningkatkan pembinaan potensi maritim diwilayah perbatasan Laut Natuna Utara, menyatakan:

“1) Menyiapkan kekuatan pertahanan dan Keamanan di perbatasan laut Natuna; 2) Pelaksanaan Ops Bhakti TNI AL di perbatasan laut natuna, 3) Tersusunnya karakter kebijakan bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai potensi maritim. 4) Menguatnya diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE.”

Sekarang, tinggal kemauan saja dari semua stakeholder yang ada untuk bisa mewujudkannya dengan mengubah regulasi dan tanggungjawab untuk memaksimalkan mempertahankan Pengamanan pulau-pulau terluar serta peran satgas marinir dalam pembinaan maritim diwilayah Perbatasan Laut Natuna Utara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan satgas marinir mendukung pengaman pulau-pulau terluar dengan memiliki kemampuan, antara lain: 1) Kemampuan pertahanan terbatas terhadap serangan atau pendudukan militer Asing; 2) Kemampuan pengawasan; dan 3) Kemampuan pencegahan transit kegiatan illegal.
2. Dalam pembinaan maritim diwilayah perbatasan Laut Natuna Utara Satgas Marinir Pengamanan pulau-pulau terluar melaksanakan pembinaan potensi maritim di wilayah perbatasan laut Natuna Utara secara terbatas, Dengan cara mendidik dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada masyarakat di perbatasan wilayah laut Natuna utara, sebagai upaya pengamanan pembinaan Dawilhanla menjadikan garda terdepan pertahanan Laut.
3. Pada saat ini kewenangan regulasi pembinaan potensi Maritim yang secara resmi berada di Satuan kewilayahan, Lanal dan Lantamal. Namun Satgas Marinir pengamanan pulau-pulau terluar dalam melaksanakan pembinaan potensi Maritim, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terbatas disamping tugas pokoknya sebagai pengamanan pulau-pulau terluar.

DAFTAR PUSTAKA

Checkland, Peter B. & Poulter, J. (2006). Learning for Action: A short definitive account of Soft Systems Methodology and its use for Practitioners,

- teachers and Students, England: John Wiley & Sons Ltd, The Atrium Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ
- Dansatgas Marinir IV, *Pengamanan pulau terluar Natuna* 2020.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy, J., (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya hal 3
- Najoan, B., Kawengian, D. D., & Harilama, S. H. (2017). Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial Di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat. *Acta Diurna Komunikasi*, 6(3).
- Natika, L., & Nuraida, N. (2020). Efektivitas Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Terungtum Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus Di Kecamatan Pusakanagara). *The World of Public Administration Journal*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Presiden RI no 66 Tahun 2019 *Tentang Susunan Organisasi TNI*.
- Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol*, 6(2), 268.
- Rappaport, J. (1995). *Studies in Empowerment: Introducing to the Issue, Prevention In Human Issue, USA, 1987*, hal: 122. 47 Ife, Jim, *Community Development: Creating Community Alternative, Vision, Analysis and Practice*, Australia, Longman.
- Ridwan HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Riptanto, S. H., & Hasan, S. (2023). Optimalisasi Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Nasional Di Kalimantan Timur Guna Menghadapi Ancaman Militer Di ALKI II. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(4), 965-974.
- Windiarti, N. A. (2015). Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) mino tirtorejo di Desa Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. *Publika*, 3(8).